ANALISIS AKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUATAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA SENAMA NENEK KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

SURYA AKBAR

Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Indragiri

Jl. Azki Aris, Rengat. Kode Pos 29318. Telp. (0769) 22458

Abstrak :

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian ilmiah yang menjelaskan tentang pemetaan aktor yang memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat tepatnya di Desa Senama Nenek Kabupaten Kampar. Penetapan suatu kebijakan yang mengikat di lingkungan masyarakat tentunya dihasilkan melalui gagasan dan legitimasi para aktor yang ada, baik itu dari Pemerintahan Desa maupun aktor yang berasal dari luar instansi pemerintahan namun memiliki akses, kekuatan dan kepentingan untuk turut mempengaruhi arah penetapan sebuah kebijakan. Melalui penelitian ini akan dijelaskan identifikasi masing-masing aktor tersebut serta mengukur derajat kekuatan dan kepentingan mereka dalam memberikan pengaruh pada arah kebijakan publik di lingkungan desa Senama Nenek. Penelitian ini juga mengidentifikasi pola hubungan antar aktor secara lebih luas melalui skema hubungan dalam jaringan struktural organisasi pemerintah desa dan hubungan organisasi pemerintahan desa dengan aktor maupun kelompok masyarakat diluar jaringan struktural. Pentingnya suatu kajian tentang hubungan antar aktor ini memberikan penjelasan kepada kita tentang sejauh mana hubungan yang terjalin antara masing-masing aktor dalam hubungan yang harmonis atau konflik tersembunyi karena pada dasarnya penetapan suatu kebijakan yang akan dibuat dan diterapkan berdampak kepada keseluruhan masyarakat oleh karena itu kebijakan tersebut haruslah memiliki manfaat dan bukan kebijakan yang hanya mengutamakan kepentingan personal maupun kelompok belaka. Kebijakan yang berkualitas dan memiliki manfaat dapat dihasilkan dari para aktor yang memiliki kekuatan dan kepentingan yang saling seimbang tidak saling mendominasi dan memobilisasi.

Kata Kunci : Penelitian, Senama Nenek, Aktor, Kebijakan Publik, Struktural, Kekuatan, Pengaruh dan Kepentingan

Abstract :

This research is a scientific study that explains the mapping of actors who have influence in the community precisely in the Village Senama Nenek Kampar District. Determination of a binding policy in the community certainly results from the ideas and legitimacy of the existing actors, both from the Village Government and actors who come from outside government agencies but have access, power and interests to participate in influencing the direction of a policy. Through this research, it will be explained the identification of each of these actors as well as measuring the degree of strength and their interest in influencing the direction of public policy in the village of Senama Nenek. Through this research, it will be explained the identification of each of these actors as well as measuring the degree of

strength and their interest in influencing the direction of public policy in the village of Senama Nenek. This study also identifies patterns of relations between actors more broadly through the scheme of relationships in the structural network of village government organizations and the relationship of village government organizations to actors and community groups outside the structural network. The importance of a study of the relationship between actors provides an explanation for us about the extent to which the relationship exists between each actor in a harmonious relationship or hidden conflict because basically the determination of a policy that will be made and implemented has an impact on the whole community because of that policy must have benefits and not policies that only prioritize personal or group interests. Quality policies that have benefits can be produced from actors who have balanced strengths and interests who do not dominate and mobilize each other.

Keywoord : *Research, Senama Nenek, Actors, Public Policy, Structural, Strength, Influence and Interest*

I. Pendahuluan

Menurut *William N. Dunn* (2003:132) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebuah *list* pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan.

Berdasarkan pemahaman mengenai definisi sebuah kebijakan yang dipaparkan oleh *Dunn* di atas maka suatu tindakan untuk dapat merespon suatu permasalahan dan menghasilkan sebuah kebijakan bisa diperoleh dari beragam pilihan-pilihan tindakan yang bisa saja berasal dari berbagai aktor dan kalangan dalam lingkup suatu organisasi maupun masyarakat.

Disamping itu, *Riant Nugroho* (2012:120) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah dan itu merupakan suatu pilihan. Selanjutnya, *Islamy* (2000) memberikan penjelasan mengenai tahapan pengambilan kebijakan, yakni :

1. Perumusan masalah
   Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan.
2. Penyusunan Agenda Kebijakan
   Dari sekian banyak masalah publik yang telah diidentifikasi, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif.
3. Pemilihan Alternatif Kebijakan
   Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Pemilihan alternatif kebijakan meliputi kegiatan :
   a. Identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah.
   b. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif, bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu jelas pengertiannya.
   c. Menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, sehingga jelas bahwa

setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing.

d. Memilih alternatif yang memuaskan.

4. Pengesahan Kebijakan
   Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima (*comforming to recognized principles or accepted standards*).

Hal senada yang disampaikan oleh *Riant Nugroho* hampir tidak jauh berbeda dengan pemahaman yang disampaikan *Dunn* mengenai kebijakan publik. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kegiatan untuk dapat berbuat atau tidak berbuat yang menjadi pilihan pemerintah yang dihasilkan dari pemilihan berbagai ragam alternatif yang ada. Selain itu, dari beragam tahap dan proses penetapan suatu kebijakan publik yang disampaikan oleh parah ahli cukup memungkinkan bagi para aktor dan kelompok kepentingan lainnya untuk turut memberikan masukan dan pengaruh mereka terhadap arah suatu kebijakan.

Kemungkinan bagi para aktor dan kelompok kepentingan lainnya dalam memberikan pengaruh kepada kebijakan ini dikuatkan dengan adanya nilai-nilai yang dapat mempengaruhi tindakan para pembuat kebijakan menurut *Wibawa* (2002), yakni :

1. Nilai Politik
   Dimana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.
2. Nilai Pribadi
   Dimana seringkali keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan dan sebagainya.
3. Nilai Ideologi
   Dimana nilai ideologi seperti misalnya nasionalisme dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri.
4. Nilai Organisasi
   Dalam hal ini keputusan-keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (*rewards*) dan sanksi (*sanction*).
5. Nilai Kebijakan
   Dalam hal ini keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau pembuatan kebijakan yang secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya *Islamy* (1991) menjelaskan tentang adanya faktor-faktor yang mempengaruhi proses penetapan suatu kebijakan, yakni :

1. Tekanan dari luar
2. Kebiasaan lama
3. Sifat pribadi pembuatan kebijakan
4. Pengaruh kelompok luar
5. Pengaruh keadaan masa lalu

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh *Islamy* di atas kembali lagi dapat memberikan penekanan kepada kita bahwa kemungkinan besar suatu kebijkan publik yang dibuat oleh para pembuat kebijakan bisa dipengaruhi oleh aktor- aktor maupun kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat.

Suatu kebijakan dibuat pada umumnya untuk mengatasi suatu persoalan tertentu maupun mengantisipasi kemungkinan terjadinya distorsi dikalangan masyarakat, untuk itu tidak ada prinsip kebetulan dalam suatu kebijakan publik, segala sesuatunya haruslah direncanakan meskipun alternatif-alternatif yang dihasilkan berasal dari berbagai kemungkinan yang ada termasuk dari akto-aktor dan kelompok-kelompok masyarakat karena prinsipnya adalah tujuan kebijakan publik adalah :

1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
2. Melindungi hak-hak masyarakat.
3. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut maka kebijakan yang dibuat berasal dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat, namun legitimasinya oleh pihak yang berwenang.

Ada ragam kebijakan publik yang dapat dihasilkan oleh pemerintah, menurut *Gabriel A Almond* dan *G. Bingham Powell* (1966) kebijakan publik dapat diklasifikan menjadi 4 (empat) kategori, yakni :

1. **Kebijakan Publik dalam hal penarikan sumber daya manusia *(extractions)***
   Mengacu pada sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ditarik dari sistem politik masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi, wajib militer dan sebagainya. Penarikan sumber daya ini adalah biaya yang dipikul oleh masyarakat dalam rangka menghidupkan negaranya.
2. **Kebijakan publik dalam hal pengaturan *(regulations)***
   Mengacu pada berbagai bentuk pengaturan pemerintah agar tata kehidupan pemerintah dan masyarakat dapat mencapai tingkat harmonisasi.
3. **Kebijakan publik dalam hal pembagian *(allocations)***
   Artinya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk melakukan distribusi biaya, barang, pelayanan, kehormatan, status penghargaan, kesempatan kepada masyarakat.
4. **Kebijakan publik dalam hal pengaturan lamban*g (symbols)***
   Artinya pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur secara khusus tentang penetapan simbol dan lambang kesetiaan kepada negara.

Selain itu, kebijkan publik juga memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dipahami melalui pemaparan menurut *Solichin Abdul Wahab* (2008), berikut ini:

1. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik pada umumnya bukanlah merupakan suatu tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang telah direncanakan.
2. Pada hakikatnya kebijakan terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu, yang dimana tindakan-tindakan ini dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan memiliki kaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit. misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau menggalakkan program perumahan rakyat bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin juga berbentuk negatif.
   - Dalam bentuk positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi masalah tertentu.
   - Sedangkan dalam bentuk negatif, kebijakan publik kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak

bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam suatu masalah dimana campur tangan pemerintah justru sangat diperlukan.

Kebijakan publik ini sendiri pada umumnya dihasilkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan keberadaannya mengikat orang banyak karena dilegitimasi oleh pihak yang memiliki kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tentunya dalam hal ini Pemerintahan Desa merupakan salah satu organisasi yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan yang dapat mengikat seluruh masyarakat di lingkungan desa tersebut.

Penelitian ini mengarah pada suatu desa yang terletak di Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu yakni Desa Senama Nenek, dalam hal ini peneliti mencoba untuk melihat, menganalisa selanjutnya mampu mengidentifikasi aktor-aktor yang ada di desa tersebut, baik aktor yang terlihat maupun tidak, aktor utama yang berasal dari kalangan pemerintahan desa maupun aktor lainnya yang berasal dari luar pemerintahan desa. Penilitian ini berguna untuk melihat dan mengetahui pengaruh aktor-aktor tersebut setelah diidentifikasi dalam hal penetapan sebuah kebijakan yang ada dan mengikat khususnya masyarakat desa rantau bais.

Untuk itu, obyektivitas penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang keberadaan aktor-aktor tersebut serta pengaruh yang mereka miliki dalam studi analisis aktor.

I. a. Gambaran Umum Wilayah

I.a.1. Kecamatan Tapung Hulu

Kecamatan Tapung Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya menurut pengukuran BPS adalah 3.662,36 Ha. Batas wilayah Kecamatan Tapung Hulu meliputi :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung Hilir dan Kecamatan Tapung
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuok dan Kecamatan Bangkinang Seberang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan hulu.

Desa yang terluas di Kecamatan Tapung Hulu adalah Desa Sinama Nenek dengan luas sekitar 1.559,12 Ha atau 42,57% dari luas Kecamatan Tapung Hulu. Kemudian diikuti oleh Desa Danau Lancang dengan luas 900,01 Ha atau 24,58%. Sedangkan desa dengan jumlah paling sedikit yaitu Desa Intan Jaya dengan luas sebesar 10,24 Ha atau 0,28%. Sebagian besar wilayah Tapung Hulu digunakan untuk lahan perkebunan.

Kecamatan Tapung Hulu mempunyai 14 desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Senama Nenek. Kecamatan Tapung Hulu merupakan pemekaran dari Kecamatan Tapung yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2001.

Sebanyak 7 desa di Kecamatan Tapung Hulu merupakan Desa Transmigrasi yaitu :

1. Desa Rimba Beringin
2. Bukit Kemuning
3. Tanah Datar
4. Intan jaya
5. Rimba Jaya
6. Rimba Makmur
7. Sumber Sari

7 Desa yang lain merupakan Desa Induk yaitu :

1. Kasikan
2. Senama Nenek
3. Danau Lancang
4. Suka Ramai
5. Kasau Makmur
6. Talang Danto
7. Muara Intan

Sebanyak 5 Desa di Tapung Hulu : Tanah datar, Intan Jaya, Rimba Jaya, Rimba Makmur, dan Muara Intan yang sebelumnya dalam proses sengketa kepemilikan dengan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, telah mendapatkan putusan dari MA bahwasanya Desa tersebut merupakan wilayah Kecamatan Tapung Hulu.

Desa Danau Lancang, Kasikan, Kusau Makmur dan Senama Nenek merupakan desa yang sulit dijangkau wilayahnya dibandingkan dengan wilayah desa yang lain dikarenakan infrastruktur jalan serta wilayah desa yang jauh. Desa dengan jarak terjauh antara ibukota desa/kelurahan dan ibukota kecamatan adalah Rimba Beringin dengan jarak 30 km, kemudian diikuti Desa Talang Danto dengan jarak 28 km. Sedangkan jarak desa yang terdekat dengan ibukota Kecamatan Tapung Huluadalah Desa Senama Nenek dengan jarak 1 km.

Kecamatan Tapung Hulu memiliki 53 Dusun/Lingkungan, 164 RW dan 558 RT dengan jumlah penduduk pada Tahun 2016 yaitu 84.517 jiwa. Pada tahun 2015Jumlah penduduk Kecamatan TapungHulu sebanyak 93.294 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 47.607 jiwa dan jumlah penduduk perempuansebanyak 45.687 jiwa, dengan luas wilayahsekitar ±46,62 KM2. Setiap KM2 ditempatipenduduk sebanyak 2.001 jiwa padapertengahan tahun 2015. Rata-rata anggotarumah tangga pada tahun 2015 adalah 4 jiwa.

Secara umum jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2015, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

a. Pendidikan

Tahun 2016 Kecamatan Tapung Hulu memiliki sarana pendidikan negeri dan swasta yaitu 30 unit sekolah TK, 34 unitSekolah Dasar, 11 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 5 unit Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) dan Madrasyah Aliyah (MA).

b. Kesehatan

Di Kecamatan Tapung Hulumemiliki 1 unit rumah sakit, 27 unit Poliklinik, 3 unit Puskesmas 5 unit Pustu, 77 unit Posyandu yang tersebar di 7 Desa serta 19 unit Apotik yang tersebar di 9 desa. Untuk tenaga kesehatan, di Kecamatan Tapung Hulu terdapat 9 orang dokter umum/spesialis yang bertugas di Desa Senama Nenek, Suka Ramai dan Talang Danto. Sedangkan bidan berjumlah 9 orang yang tersebar 9 desa yang ada di Kecamatan Tapung Hulu serta 2 orang Apoteker yang bertugas di Desa Suka Ramai dan Talang Danto . Alokasi Dokter di Desa Senama Nenek yaitu 2 orang dan 1 orang bidan.

c. Perekonomian

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kecamatan Tapung Hulu berasal dari sektor pertanian. Dari 26.617 rumah tangga, sekitar 17.149 rumah tangga merupakan keluarga pertanian. Hal ini disebabkan karena banyaknya Perusahaan Perkebunan yang tersebar di Kecamatan Tapung Hulu, baik Swasta maupun Pemerintah. Keluarga Pertanian

ini tersebar di Desa Kasikan, Desa Senama Nenek, dan Desa Danau Lancang.

Namun, tidak sedikit rumah tangga yang menjadi keluarga pertanian juga karena mereka memiliki lahan sendiri. Hal ini banyak dijumpai di Desa Danau Lancang, Senama nenek, Kusau Makmur dan 7 Desa Transmigrasi yang terdapat di Kecamatan Tapung Hulu.

Selain Sektor pertanian, Sektor Perdagangan dan Sektor Perindustrian merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kecamatan Tapung Hulu. Melalui Sektor Perdagangan, dapat dilihat sebanyak 12 Pasar umum, 12 KUD dan 7 unit Bank tersebar di Kecamatan Tapung Hulu. Desa Danau Lancang merupakan wilayah yang memiliki paling banyak pasar umum, yaitu 3 lokasi.

Disamping itu, sebanyak 366 Kios/ Warung tersebar di Kecamatan Tapung Hulu. Toko dan Kios/Warung paling banyak dijumpai di Desa Suka Ramai, masingmasing sebanyak 143 unit. Sementara dari Sektor Industri, sebanyak 16 unit Industri Besar yang tersebar di Kecamatan Tapung Hulu.

Industri Besar tersebut tersebar dibeberapa desa yang ada di Kecamatan Tapung Hulu seperti Desa Kasikan, Desa Rimba Beringin, Desa Senama Nenenk, Desa Danau Lancang, Desa Suka Ramai dan Desa Talang Danto.

1.a.2. Desa Senama Nenek

Secara orbitasi desa, jarak desa ke ibukota kecamatan berjarak 00,5 Km. Jarak desa ke ibukota Kabupaten Kampar sekitar 75 Km dan jarak Kelurahan ke ibukota Provinsi sejauh 135 Km.

Desa Senama Nenek mempunyai luas wilayah 155.912 Hektar yang mencakup 5 (Lima) lingkungan/dusun, RW dan RT dengan jumlah penduduk 11.940 jiwa. Secara geografis Desa Senama Nenek berbatasan langsung dengan beberapa wilayahdi sekitarnya, yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Danau Lancang
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Sumber Sari/Sekijang
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tandun/UjungBatu/Kota Lama
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kasikan/Kusau Makmur

a. Kependudukan Desa Senama Nenek

Berdasarkan data profil desa pada tahun 2018 jumlah penduduk Desa Senama Nenek mencapai 11.940 jiwa yang terdiri dari 5.699 jiwa Laki-laki dan 6.241 jiwa perempuan dengan jumlah Keluarga Rumah Tangga/ KK sebanyak 1.300 KK. Kategori pendudukan berdasarkan usia di Desa Senama Nenek dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Senama Nenek Tahun 2018

No.	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Org)
1.	0 – 10 Tahun	715	855	1.570
2.	11 – 20 Tahun	1.165	1.255	2.420
3.	21 – 30 Tahun	975	1.060	2.035
4.	31 – 40 Tahun	933	987	1.920
5.	41 – 50 Tahun	701	794	1.495
6.	51 – 60 Tahun	551	604	1.155
7.	61 – 70 Tahun	520	517	1.037
8.	Di atas 71 Tahun	139	169	308
Jumlah		**5.699**	**6.241**	**11.940**

Sumber : *Data olahan mandiri profil desa Senama Nenek Tahun 2018*

Kategori penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Senama Nenek dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Senama Nenek Tahun 2018

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Org)
1.	Petani	330	328	658
2.	Pegawai Negeri Sipil	25	30	55
3.	Peternak	40	47	87
4.	Dokter Swasta	1	0	1
5.	Bidan Swasta	0	20	20
6.	Lainnya	396	425	821
Jumlah		**792**	**850**	**1.642**

Sumber : *Data olahan mandiri profil Desa Senama Nenek Tahun 2018*

Penggolongan penduduk menurut pendidikan dapat dilihat melalui uraian berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Senama Nenek

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Org)
1.	Usia3-6tahunyangbelummasukTK	52	61	113
2.	Usia3-6tahun yang sedang TK/ playgroup	125	152	277
3.	Usia 7–18 tahun yang tidak pernah sekolah	410	477	887
4.	Usia 7–18 tahun yang sedang sekolah	1.025	1128	2.153
5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	310	395	705
6.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	330	260	590
7.	Usia 18- 56 tahun tidak tamat SLTP	125	305	430
8.	Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	177	255	432
9.	Tamat SD/ sederajat	515	610	1.125
10.	Tamat SMP/ sederajat	550	490	1.040
11.	Tamat SMA/ sederajat	886	935	1.821
12.	Tamat D-1 s/d D-3	83	95	178
13.	Tamat S-1 s/d S-3	80	95	175
Jumlah		**4.668**	**5.258**	**9.926**

Sumber : *Data olahan mandiri profil desa Senama Nenek Tahun 2018*

Kategori penduduk berdasarkan tenaga kerja di Desa Senama Nenek sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tenaga Kerja Desa Senama Nenek

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Org)
1.	Penduduk usia 18–56 tahun yang bekerja	1.485	1.150	2.635
2.	Penduduk usia18 –56 tahun yang belum/tidak bekerja	1.671	2.290	3.961
3.	Penduduk usia 56 tahun ke atas	0	0	0
Jumlah		**3.156**	**3.440**	**6.596**

Sumber : *Data olahan mandiri profil desa Senama Nenek Tahun 2018*

Kategori penduduk berdasarkan kualitas angkatan kerja di Desa Senama Nenek sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kualitas Angkatan Kerja Desa Senama Nenek

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Org)
1.	Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	40	25	65
2.	Penduduk usia 18 -56 tahun yang tamat SD	145	70	215
3.	Penduduk usia18 -56 tahun yang tamat SLTP	335	115	450
4.	Penduduk usia 18 -56 tahun yang tamat SLTA	850	795	1.645
5.	Penduduk usia 18 -56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	115	145	260
Jumlah		**1.525**	**1.175**	**2.700**

Sumber : *Data olahan mandiri profil desa Senama Nenek Tahun 2018*

Selanjutnya, berikut ini kategori penduduk berdasarkan cacat mental dan fisik yang ada di Desa Senama Nenek :

Tabel 6. Penduduk berdasarkan cacat mental dan fisik

Jenis Cacat Fisik	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Tuna rungu	7	9
2. Tuna wicara	5	4
3. Tuna netra	5	3
4. Lumpuh	3	2
5. Sumbing	2	3
6. Cacat kulit	-	-
7. Cacat fisik/tuna daksa lainnya	-	-
Jumlah	-	-
Jenis Cacat Mental		
1. Idiot	6	4
2. Gila	3	5
3. Stress	-	-
4. Autis	-	-
Jumlah	31	30

Sumber : *Data olahan mandiri profil desa Senama Nenek Tahun 2018*

Sedangkan, untuk penggolongan penduduk menurut Agama yaitu sebagai berikut :

- Islam : 7.895 Jiwa
- Kristen : 3.458 Jiwa

b. Kesehatan

Sarana Kesehatan Utama di Desa Senana Nenenk terdiri dari 6 unit poliklinik, 1 unit Puskesmas, 10 Unit Pustu, 18 Unit Pusyandu dan 1 unit Apotik. Desa Senama Nenenk terdapat 2 orang Dokter Umum dan 1 Orang Bidan. Bidan merupakan sarana kesehatan utama di Kecamatan Tapung Hulu karena mudah dijangkau oleh penduduk danbiaya relatif lebih murah.

c. Keagamaan

Sarana Agama di Desa Senama Nenek dapat dilihat dari bangunan-bangunan tempat ibadah bagi masyarakat berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang mereka anut. Jumlah Mesjid sebanyak 15 (lima belas) unit, 7 (tujuh) unit Mushalla, 2 (dua) unit Surau dan 6 (enam) unit Gereja.

Selain itu, masyarakat di Desa Senama Nenek juga memiliki beberapa kelompok pengajian yakni Ikatan Wirid Yasin Ibu-Ibu dan Ikatan Wirid Yasin Bapak-bapak atau Perangkat Desa. Kegiatan Wirid Yasin Ibu-Ibu dilakukan 2

kali dalam seminggu yaitu setiap Hari Senin dan Rabu sedangkan Wirid Yasin Bapak-Bapak/Perangkat Desa dilakukan 1 kali dalam seminggu yaitu setiap Hari Selasa Malam.

d. Pendidikan

Apabila dilihat dari sarana pendidikan maka saat ini Desa Senama Nenek sendiri memiliki 1 (satu) unit PAUD/TK, 5 (lima) unit SD, 1 (satu) unit

SLTP dan belum adanya sarana pendidikan tingkat SLTA.

e. Perekonomian

Dari hasil data wawancara dengan Sekretaris Desa Senama Nenek, mayoritas pencaharian masyarakat Desa Senama Nenek adalah sebagai petani kelapa sawit atau bekerja di perusahaan perkebunan sawit dari pihak swasta dan pemerintah. Adapun PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) masyarakat Desa Senama Nenek secara keseluruhan rata-rata mencapai Rp. 2.000.000,-/ bulan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada umumnya digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data serta proses investigasi dari data yang diperoleh. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Metode penelitian menurut *Sugiyono* (2014 : 2) adalah cara ilmiah yang ditempuh seorang peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk itu, penentuan metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah dirasakan sangatlah penting agar suatu karya ilmiah yang dihasilkan lebih terarah dan berkualitas.

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut *Sugiyono* (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah untuk memberikan gambaran dan informasi yang jelas dan mendalam terhadap suatu fenomena dan permasalahan yang peneliti angkat dalam tulisan ini, seperti yang dijelaskan oleh *Kriyantono* (2006) bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

II.a. Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam membuat suatu penelitian maka seorang peneliti harus menentukan instrumen yang bisa digunakan dalam pengumpulan informasi atau data yang dibutuhkankan, hal ini perlu dilakukan agar pekerjaan meneliti lebih terarah dan terukur dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas.

Menurut *Suharsimi Arikunto* (2010 : 265) instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Adapun tekhnik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi langsung ke tempat penelitian untuk memahami lingkungan tempat penelitian dibuat.
2. Wawancara
   Peneliti langsung melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa aktor yang sudah ditentukan.
3. Tiangulasi

Tekhnik triangulasi juga peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk menggabungkan semua tekhnik pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data yang peneliti peroleh di lapangan.

4. Dokumen
   Peneliti juga memperoleh data dari tekhnik pengumpulan data dokumen melalui dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian seperti dokumentasi, profil desa dan lainnya.

Untuk data penelitian ini peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan dua kelompok data, yakni :

1. Data Primer
   Merupakan bentuk data yang peneliti peroleh langsung dari tempat penelitian seperti data wawancara dan dokumentasi.
2. Data Sekunder
   Merupakan data pendukung seperti arsip dan dokumen-dokumen pendukung seperti profil desa yang memuat gambaran umum wilayah penelitian, struktur organisasi pemerintahan desa dan lainnya.

III. PEMBAHASAN

Setelah berakhirnya masa orde baru maka ditetapkanlah UU Republik Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Jenis Pemerintahan yang memiliki kewenangan otonomi daerah ini awal mulanya diatur melalui UU RI No. 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU RI No. 32 Tahun 2004 lalu direvisi kembali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 dan yang terbaru adalah UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 ini maka lingkup pemerintah meliputi :

1. Pemerintah yang merujuk kepada pemerintah pusat.
2. Pemerintah Derah yang merujuk kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota.
3. Pemerintah Desa.

UU RI No. 23 Tahun 2004 memberikan definisi tentang otonomi daerah, yakni :

> "Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Desa sekalipun juga memiliki suatu wilayah dan memiliki hak untuk mengurus serta mengelolah seluruh kompetensi dan sumber daya yang ada di wilayah mereka sendiri, selagi kegiatan tersebut bertujuan untuk :

a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
b. Meningkatkan Pelayanan Umum.
c. Meningkatkan Daya Saing Daerah.

Hal-hal yang dimaksudkan di atas merupakan tujuan diselenggarakannya otonomi daerah pada tingkat daerah maupun desa.

Berdasarkan ketentuan dari UU yang sama dijelaskan bahwa :

> "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Berdasarkan hal inilah kemudian ada suatu jaminan bagi Pemerintahan Desa untuk membuat aturan dalam bentuk peraturan yang mengikat seluruh masyarakat pada desa tersebut yang itu merupakan suatu kebijakan publik.

Kepala Desa merupakan aktor utama dalam melegitimasi kebijakan publik kalau kita mengarah kepada kebijakan atau peraturan ditingkat desa, namun perlu dipahami bahwa kepala desa bukanlah satu-satunya kator yang memiliki kepentingan dalam penetapan suatu kebijakan. Faktanya ada beragam aktor yang tersembunyi maupun yang tampak yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam mempengaruhi penetapan suatu kebijakan.

III.a. Pemetaan Aktor Desa Senama Nenek

Analisis aktor *(Stakeholder)* dapat dipahami sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan masing-masing aktor dari berbagai kalangan dan kelompok masyarakat dalam memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan suatu kebijakan di lingkungan suatu masyarakat. *Stakeholder* dapat dipahami sebagai orang-orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam sistem, berupa perorangan, komunitas, kelompok sosial, atau organisasi yang dipengaruhi atau terpengaruh oleh sistem. Artinya adalah beragam aktor *(stakeholder)* yang ada di lingkungan masyarakat memiliki pengaruh dalam keberlangsungan strategi yang berkelanjutan.

Keberadaan aktor yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah individu/ perorangan atau kelompok kepentingan seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh dan kekuatan untuk mempengaruhi arah kebijakan yang dibuat oleh pihak yang berwenang.

Melalui kegiatan pemetaan aktor *(Stakeholder)* ini, dilakukan untuk mengenal aktor-aktor dalam kaitannya dengan keberadaan dan aktifitas pelaku dalam proses pengembangan masyarakat, tidak hanya yang berpotensi untuk diajak kerjasama tetapi juga yang berpotensi untuk menghambat pelaksanaan program ke depan. Selanjutnya, jaringan hubungan antar aktor dapat dipahami setelah proses pemetaan aktor dianalisis. Adanya aktor yang memiliki pengaruh dan kepentingan dilingkungan masyarakat hampir identik dengan kelompok elite dalam lingkungan politik. Oleh karena itu, Perlunya analisis pihak-pihak berkepentingan untuk :

- Mengenali pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya ekonomi setempat.
- Menggolongkan pihak-pihak utama terkait (formal dan informal) berdasarkan kepentingan mereka, kondisi ekonomi, kiat-kiat dan dinamika kegiatan mereka saat ini.
- Mengikuti dinamika regulasi/aturan main diantara pihak-pihak terkait dalam rangka pemanfaatan sumberdaya ekonomi lokal.
- Menganalisa perbedaan interpretasi masing-masing pihak terkait mengenai pemanfaatan sumberdaya ekonomi lokal.
- Menganalisis jaringan sosial diantara para *stakeholders* dalam memanfaatan sumber daya yang ada.

Selain dari itu, analisa pembahasan selanjutnya akan mengarah kepada sudut pandang jaringan hubungan yang terjadi antar aktor yang terdiri dari individu, kelompok dan organisasi.

Jaringan hubungan antar aktor juga memiliki beberapa prinsip logis yang merupakan tempat bersandarnya pemikiran-pemikiran tentang pola hubungan jaringan itu sendiri, yaitu :

1. Ikatan antar aktor biasanya adalah simetris baik.
2. Ikatan antara individu yang harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas.
3. Ada ikatan asimetris antara unsur-unsur didalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas akan terdistribusikan secara tak merata.
4. Distribusi yang tampak dari sumber daya yang terbatas menimbulkan baik itu kerjasama maupun kompetisi.
5. Terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan.

Jaringan sosial menjadi sangat penting di dalam masyarakat karena di dunia ini bisa dikatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak menjadi bagian dari jaringan-jaringan hubungan sosial dari manusia lainnya. Walaupun begitu manusia tidak selalu menggunakan semua hubungan sosial yang dimilikinya dalam mencapai tujuan-tujuannya, tetapi disesuaikan dengan ruang dan waktu atau konteks sosialnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari aspek pemetaan aktor serta jaringan hubungan antar aktor di Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu dapat diambil suatu kesimpulan tentang analisa aktornya sebagai berikut :

Tabel 7. Analisis Aktor Desa Senama Nenek

No.	Nama : Individu, Kelompok/ Organisasi	Nama Aktor	Posisi Sosial	Peranan Sosial	Kekuatan Aktor	Kepemimpinan (Dalam kaitan dengan program Comdev/ *Community Development*)
1.	Pemerintah Desa	Abdoel Rakhman Chan	Kepala Desa	Berpengaruh pada lingkungan desa	Sangat berpengaruh	Baik
2.	Pemerintah Desa	Budiman, S.Pd.I	Sekretaris Desa	Berpengaruh pada lingkungan desa	Sangat berpengaruh	Baik
3.	Pemerintah Desa	Hj. Putriyanti	Ketua PKK	Berpengaruh pada lingkungan desa	Sangat berpengaruh	Baik
4.	Pemerintah Desa	H. Jajang Soeryadi	Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	Berpengaruh pada lingkungan desa	Sangat berpengaruh	Baik
5.	Pemerintah Desa	H. Syahril	Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	Berpengaruh pada lingkungan desa	Sangat berpengaruh	Baik
6.	Pemerintah Desa	Wismar Susanto	Ketua Karang Taruna	Berpengaruh pada organisasi Ikatan Pemuda	Sangat berpengaruh	Baik
7.	Pemerintah	Iskandar	KAUR.	Berpengaruh	Berpengaruh	Baik

	Desa		Pembangunan	pada lingkungan desa		
8.	Pemerintah Desa	Makmur AMR	KAUR. Kesra	Berpengaruh pada lingkungan desa	Berpengaruh	Baik
9.	Pemerintah Desa	Bahtar	KAUR. Pemerintah	Berpengaruh pada lingkungan desa	Berpengaruh	Baik
10.	Pemerintah Desa	Mulyadi	Linmas	Berpengaruh pada lingkungan desa	Sangat berpengaruh	Baik
11.	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Aldiong	Babinkamtibmas	Berpengaruh pada lingkungan desa	Berpengaruh	Baik
12.	Babinsa	Sinaga	Babinsa	Berpengaruh pada lingkungan desa	Berpengaruh	Baik
13.	Tokoh Agama	H. Suwandi M. Noor	Pengurus Keagamaan	Berpengaruh pada organisasi keagamaan	Sangat berpengaruh	Baik
14.	Tokoh Adat	Yahya	Pengurus Adat kemasyarakatan	Berpengaruh pada kegiatan adat kemasyarakatan	Sangat berpengaruh	Baik
15.	Tokoh Adat	Yarmet	Pengurus adat kenegerian desa senama nenek	Berpengaruh pada organisasi adat kenegerian desa senama nenek	Sangat berpengaruh	Baik
16.	PHBI (Perayaan Hari Besar Islam)	Sukri Alno	Ketua Organisasi PHBI	Berpengaruh pada organisasi PHBI	Berpengaruh	Baik
17.	Kelompok Majelis Taqlim	Jasnita	Pengurus Kelompok Majelis Taqlim	Berpengaruh pada kelompok majelis taqlim	Berpengaruh	Baik
18.	Kepala Dusun I	Jamhur	Kepala Dusun Senama Nenek	Berpengaruh pada lingkungan dusun I	Sangat berpengaruh	Baik
19.	Kepala Dusun II	Irvan	Kepala Dusun Kepanasan	Berpengaruh pada lingkungan dusun II	Sangat berpengaruh	Baik
20.	Kepala Dusun III	Muri	Kepala Dusun Langak Jaya	Berpengaruh pada lingkungan dusun III	Sangat berpengaruh	Baik
21.	Kepala Dusun IV	Gabung Rombe	Kepala Dusun Lading Tungal	Berpengaruh pada lingkungan dusun IV	Sangat berpengaruh	Baik
22.	Kepala Dusun V	Suryono	Kepala Dusun Bangun Mulio	Berpengaruh pada lingkungan dusun V	Sangat berpengaruh	Baik
23.	Pukesmas Pembantu (PUSTU)	Bidan Ilen	Bidan Desa Senama Nenek	Berpengaruh pada lingkungan desa	Berpengaruh	Baik
24.	Sekolah	Rifki	Ketua SSB Lindai	Berpengaruh	Berpengaruh	Baik

	Sepak Bola Lindai Energi		Energi	pada lingkungan organisasi SSB		
25.	Pemerintah Desa	Parman Jasid	Pengurus BUMDes	Berpengaruh pada lingkungan desa	Berpengaruh	Baik
26.	Kelompok Ternak Batu Pilar	Arifin, S.Sos	Pengurus Kelompok Ternak Sapi	Berpengaruh pada lingkungan kelompok ternak	Berpengaruh	Baik

Sumber : *Data olahan mandiri Desa Senama Nenek Tahun 2018*

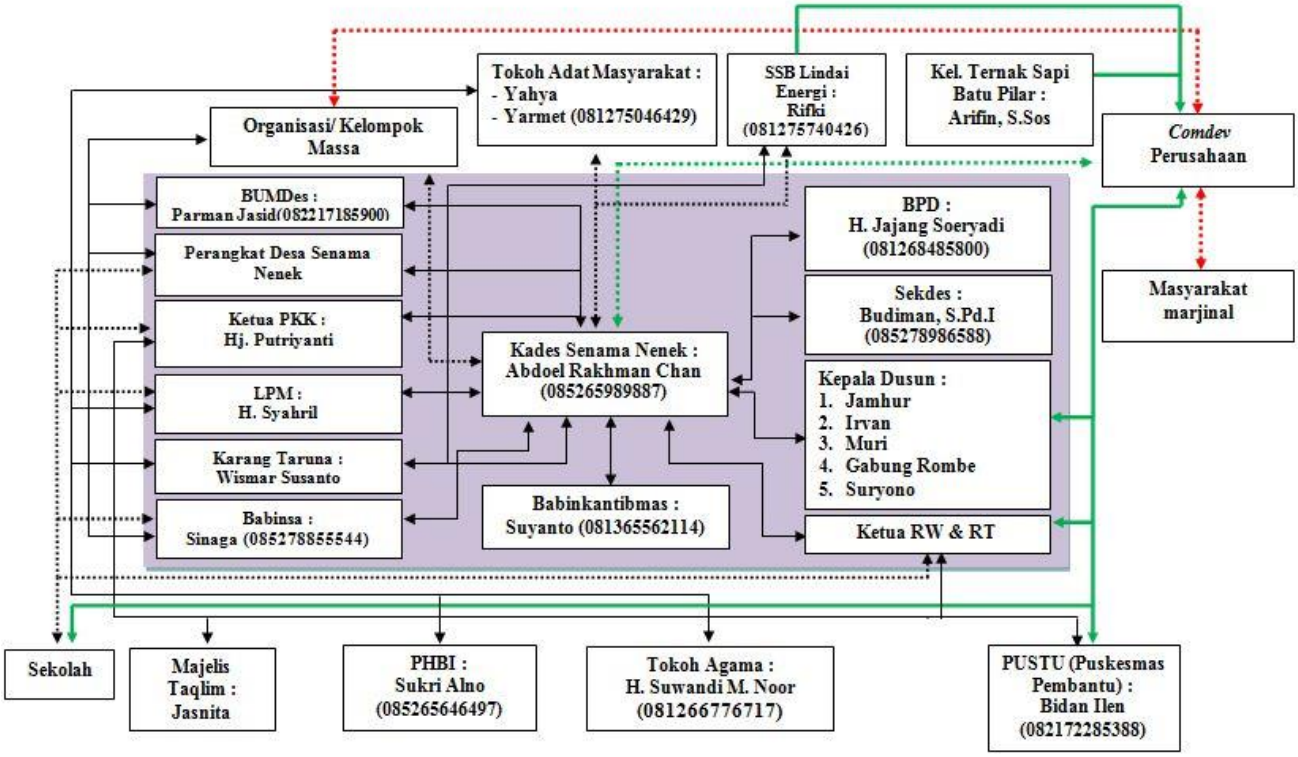
Seperti yang digambarkan pada tabel diatas, maka ada beberapa kelompok dan organisasi yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Senama Nenek, dalam hal ini bukan berarti tidak ada individu yang memiliki pengaruh untuk dapat memobilisasi anggota masyarakat, berdasarkan data tabel diatas kita tahu bahwa beberapa individu memiliki pengaruh untuk dapat memobilisasi anggota masyarakat, hanya saja dalam proses penghimpunan data diawal, ada beberapa pihak narasumber sengaja tidak memberikan *contact person* dengan maksud tertentu. Oleh karena itu, hal ini kembali diluruskan untuk menjaga originalitas uraian dan pemahaman yang kami buat tanpa menghilangkan pemahaman tentang keberadaan individu-individu yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan masyarakat Desa Senama Nenek ini.

III.b. Pemetaan Jaringan Sosial

Pemetaan jaringan sosial harus dapat memberikan ilustrasi berbagai bentuk hubungan antar aktor dengan berbagai latar belakang baik dalam posisi sebagai individu maupun institusi, baik yang bersifat *associative* maupun *dissociative.* Sudah tentu tidak mungkin menampilkan keseluruhan aktor yang terlibat dalam kehidupan masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, dalam pemetaan tersebut dipilih aktor yang mempunyai peranan menonjol dalam kehidupan masyarakat.

Pemetaan jaringan sosial yang menggambarkan hubungan antar aktor, baik individu maupun institusi beserta sifat hubungannya, baik positif maupun negatif sebaiknya dituangkan dalam bentuk skema. Dalam hal ini, skema berikut ini merupakan penjelasan tentang pemetaan jaringan sosial yang melibatkan aktor-aktor tertentu yang dianggap menonjol dan mempengaruhi interaksi sosial lingkungan masyarakat Desa Senama Nenek :

Gambar 2. Pemetaan jaringan sosial antar aktor Desa Senama Nenek



——→	Berhubungan Langsung
- - - - - - - - - - - - →	Ada hubungan namun tidak secara langsung
- - - - - - - - - - - - →	Terdapat hubungan untuk *Community Development* tapi tidak secara langsung
——→	Hubungan suatu perusahaan dengan masyarakat
- - - - - - - - - - - - →	Terdapat Konflik terselubung

Sumber : *Data olahan mandiri Desa Senama Nenek Tahun 2018*

III.b.1. Penjelasan Pemetaan Jaringan Sosial Antar Aktor Desa Senama Nenek

1. Berhubungan secara langsung artinya masing-masing aktor dan lembaga seperti BPD, PKK, LPM, Karang Taruna, Babinkantibmas, Babinsa, Kepala dusun, Ketua RW dan Ketua RT, memilik hubungan secara langsung, baik dengan Kepala Desa khususnya Desa Senama Nenek maupun dengan aktor atau organisasi pemerintahan desa lainnya. Pola hubungan yang secara langsung tersebut terjalin berdasarkan tugas, tanggung jawab, fungsi dan kewenangan masing-masing aktor dalam struktur pemerintahan Desa Senama Nenek.
2. Berhubungan tidak secara langsung artinya masing-masing aktor dan kelompok masyarakat seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kelompok Majelis Taqlim, Organisasi PHBI, SSB Linggai Energi, Pengurus Posyandu dan PUSTU serta organisasi kelompok masyarakat lainnya memiliki

hubungan tidak secara langsung dengan Kepala Desa maupun aktor Pemerintahan Desa lainnya karena tidak ikut secara langsung dalam kepengurusan inti Pemerintah Desa, hubungan tidak secara langsung ini pada umumnya lebih bersifat komunikatif dan koordinatif saja tidak berdasarkan jenjang hirarki dalam struktur kepemerintahan desa.

3. Terdapat hubungan untuk Program *Comdev* tapi tidak secara langsung, Pemerintah Desa dilibatkan dalam menghimpun aspirasi masyarakat untuk program *Community Development (Comdev)* perusahaan, namun tidak secara langsung karena arah kebijakan untuk penetapan program *Comdev* harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dari perusahaan.
4. Hubungan Perusahaan dengan masyarakat artinya dalam pola hubungan ini tetap ada keterikatan antara keberadaan suatu perusahaan dengan lingkungan masyarakat sekitar.
5. Konflik terselubung, dalam pola hubungan ini pada umumnya konflik terjadi karena adanya kesenjangan antara masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada dengan keberadaan sebuah perusahaan. Hal ini biasanya disebabkan karena banyaknya aspirasi dan permintaan masyarakat yang belum terealisasi karena apabila direalisasikan justru itu dapat memberatkan program perusahaan kedepannya.

III.b.2. Penjelasan Hubungan Antar Aktor Di Desa Senama Nenek :

Untuk melihat pola hubungan antar aktor khususnya di Desa Senama Nenek dapat dijelaskan melalui beberapa kategori aktor yakni aktor inti dalam Pemerintahan Desa, aktor pendukung dari kelompok dan anggota masyarakat serta keberadaan *Community Development (Comdev)* Perusahaan. Berikut ini adalah uraian pola hubungan antar aktor di Desa Senama Nenek :

1. Aktor inti : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, Ketua PKK, Babinkantibmas, Babinsa, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT.
   Masing-masing aktor inti Pemerintahan Desa Senama Nenek ini memiliki hubungan secara langsung dengan kepala desa dalam struktur Pemerintahan Desa, berdasarkan hasil penelitian dan pendataan aktor hubungan antar aktor cenderung baik dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang baik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing aktor.
2. Aktor pendukung dari anggota masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat : Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta Organisasi Majelis Taqlim dan Organisasi keagamaan lainnya.
   Masing-masing aktor memiliki pola hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Pemerintahan Desa dan aktor pendukung lainnya. Dalam hal ini hubungan antar aktor cenderung baik.
3. Keberadaan Perusahaan dengan program *Community Development* pada prakteknya terjadi pola hubungan yang tidak secara langsung dengan Pemerintah Desa dan hubungan yang secara langsung dengan masyarakat sebagai sasaran kegiatan seperti yang telah dijelaskan melalui gambar Pemetaan Jaringan Sosial Antar Aktor Desa Senama Nenek.

Pada kenyataannya melalui pola hubungan tersebut terdapat konflik terselebung antara Perusahaan melalui program *Comdev* dengan masyarakat setempat karena banyaknya aspirasi dan permintaan masyarakat yang belum terealisasi oleh *Comdev* Perusahaan.

Kesimpulan dari hasil pemetaan aktor dan pola hubungan antar aktor di desa senama nenek ini secara garis besar terjadi suatu pola hubungan yang cukup baik antar aktor yang terjadi dalam hubungan dan interaksi masing-masing aktor.

III.c. Deskripsi Posisi Sosial Dan Peranan Sosial Aktor Dalam Kehidupan Masyarakat

Aktor-aktor kunci seperti yang telah diuraikan pada tabel analisa aktor pada poin 1 (pertama) seperti kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, BPD, LPM, kadus, tokoh-tokoh agama, masyarakat dan pemuda masuk kepada aktor yang diidentifikasikan sebagai aktor terlihat *(visible)* yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Kemudian, untuk dapat melihat sampai sejauh mana keberadaan aktor tersembunyi *(hidden)* yang memiliki pengaruh dalam pengambilan suatu keputusan di Desa Senama Nenek tidak dapat teridentifikasi karena umumnya semua aktor dalam lingkungan masyarakat Desa Senama Nenek dapat terlihat melalui pengaruh masing-masing aktor tersebut.

III.d. Identifikasi Forum-Forum Yang Menjadi Sarana Yang Digunakan Masyarakat Dalam Membahas Kepentingan Umum/ Publik

Identifikasi forum yang digunakan masyarakat Desa Senama Nenek dalam membahas kepentingan umum dapat dilihat dari penjelasan tabel berikut ini :

Tabel 8. Identifikasi forum masyarakat Desa Senama Nenek

No.	Nama Forum	Keanggotaan	Tempat Pelaksanaan	Frekuensi pertemuan atau Jadwal	Aktifitas (apa yang dilakukan dan dibahas dalam forum tersebut)
1.	Forum masyarakat Desa Senama Nenek.	- Kepala Desa, BPD, Kadus dan Perangkat desa. - PKK - Organisasi majelis. - Organisasi keagamaan. - Organisasi masyarakat. - Organisasi pemuda. - Seluruh komponen masyarakat.	Mushalla Kantor Desa.	Tidak ditentukan.	Musyawarah dan Penjelasan permasalahan yang akan diangkat ke forum serta diskusi.
2.	Forum PHBI (Perayaan Hari Besar Islam).	- Pemuda/i - Perwakilan masyarakat desa senama nenek yang beragama islam.	Masjid/ rumah ibadah.	Tidak ditentukan (Menyambut perayaan hari besar islam).	Musyawarah dalam rangka menyambut hari besar umat islam.
3.	Majelis Taqlim	- Anggota majelis	Rumah warga/	Seminggu	Pengajian dan

	Ibu-ibu.	taqlim Ibu-ibu desa senama nenek.	Masjid.	sekali.	musyawarah.
4.	Kegiatan senior SSB linggai energi.	- Anggota SSB Senior Lindai Energi.	Lap. Sepak Bola desa senama nenek.	Seminggu 2 kali.	Latihan dan diskusi.

Sumber : *Data olahan mandiri Desa Senama Nenek Tahun 2018*

Selain melalui forum-forum yang diadakan oleh masyarakat Desa Senama Nenek dalam membahas suatu permasalaham umum ini, maka ada pula sarana lainnya bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi yakni melalui kegiatan gotong royong yang diadakan pada momen-momen tertentu yang digagas secara bersama-sama. Melalui kegiatan gotong royong disekitar lingkungan Desa Senama Nenek memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk saling bertemu dan berkumpul bersama serta memanfaatkan waktu kebersamaan tersebut untuk sedikit membahas persoalan-persoalan disekitar lingkungan mereka.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya penetapan suatu kebijakan yang bersifat mengikat terutama yang berbentuk kebijakan publik yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan tidak harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak, karena pada dasarnya penetapan suatu kebijakan adalah hal yang lumrah bila ada yang setuju ataupun tidak, namun yang jelas kebijakan yang dihasilkan harus memiliki tujuan untuk kebaikan bersama.

Setiap kebijakan yang dihasilkan akan dilegitimasi oleh pihak terkait, namun proses pembuatan kebijakan tentunya perlu mendapat perhatian khusus bagi para akademisi untuk melihat lebih jauh bagaimana suatu kebijakan tersebut dihasilkan. Pada kenyataannya suatu kebijakan dapat dihasilkan setelah melalui berbagai proses tawar dan negosiasi dari berbagai pihak yang memiliki kekuatan dan kepentingan.

Hal ini dikarenakan setiap aktor memiliki jaringan sosial artinya setiap personal dan kelompok masyarakat yang ada saling terkait dalam suatu hubungan sosial maupun politis. Aktor utama yang memiliki pengaruh terhadap suatu kebijakan merupakan aktor yang termasuk dalam jaringan struktural suatu instansi, namun aktor yang memiliki pengaruh kuat dan kepentingan yang tinggi bisa saja berasal dari luar jaringan struktural, itu bisa diakibatkan karena status sosial yang mereka miliki, dengan pengaruh itulah kemudian aktor-aktor secara personal maupun berkelompok ini mampu turut memberikan pengaruh kepada aktor jaringan struktural dalam penetapan suatu kebijakan.

Hal yang paling penting dalam suatu penetapan kebijakan adalah perencanaan dan analisa yang matang untuk memprediksi resiko yang terjadi dimasa yang akan datang terhadap suatu persoalan tertentu dan selanjutnya setiap kebijakan yang dibuat diharapkan mampu memberikan hal yang terbaik kepada masyarakat.

Proses tawar-menawar sebelum kebijakan ditetapkan merupakan hal yang biasa karena itulah kemudian musyawarah dilingkungan masyarakat perlu diadakan untuk memperoleh suatu mufakat.

Hal yang perlu dihindari adalah dominasi aktor karena kekuatan dan kepentingan yang dimiliki lantas memobilisasi dan mengarahkan kebijakan untuk kepentingan pribadi, oleh karena itu perlunya sinergitas dan keseimbangan antara aktor yang memiliki derajat

kekuatan dan kepentingan yang tinggi dengan aktor-aktor lainnya.

Selain itu juga perlunya keseimbangan kekuatan dan kepentingan dari beragam aktor yang ada baik itu aktor utama dalam jaringan struktural maupun aktor yang berasal dari luar jaringan struktural, hal ini bisa diwujudkan dengan komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis antara masing-masing aktor.

Untuk itu perlunya forum-forum rutin yang bisa diselenggarakan oleh aktor utama dalam rangka menjaga hubungan tersebut dengan melibatkan semua kalangan dan elemen dalam menanggapi setiap persoalan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua.* Jakarta : Bumi Aksara

_____ 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Almond, Gabriel dan G Bingham Powell Jr. (1966). *Comparative Politics: A Development Approach*. Boston : Little Brown

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek.* Jakarta : Rineka Cipta

Buku laporan Studi Pemetaan Sosial dan Pemangku Kepentingan PT. Pertamina Hulu Energi Siak. 2018. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIA-Indragiri

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Islamy, M. Irpan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika

_____2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika

Kecamatan Tanah Putih Dalam Angka Tahun 2017 (Badan Pusat Statistik)

Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi.* Jakarta : PT. Kencana Perdana

Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia

_____ 2012. *Public Policy*. Jakarta : Gramedia

_____2016. *Kebijakan Publik di Indonesia.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Profil Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2017

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Afabeta

_____ 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Wibawa, Samodra. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Data Wawancara

Budiman, S,Pd.I (Sekretaris Desa) 2018. Wawancara "Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri" Di Kantor Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

H. Syahril (Ketua LPM) 2018. Wawancara "Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri" Di Kantor Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Wismar Susanto (Ketua Karang Taruna) 2018. Wawancara "Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri" Di Kantor Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Mulyadi (Linmas) 2018. Wawancara "Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri" Di Kantor Desa Senama Nenek,

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Rifki (Tokoh Pemuda) 2018. Wawancara "Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri" Di Kantor Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Yarmet (Pengurus adat kenegerian desa senama nenek) 2018. Wawancara "Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri" Di Kantor Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Jamhur (Kepala Dusun Senama Nenek) 2018. Wawancara "Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri" Di Kantor Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Bidan Ilen (Bidan Desa Senama Nenek) 2018. Wawancara "Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri" Di Kantor Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Yahya (Pengurus Adat Kemasyarakatan) 2018. Wawancara "Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri" Di Kantor Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

H. Suwandi M. Noor (Pengurus Keagamaan) 2018. Wawancara "Kunjungan Kerja Dosen STIA Indragiri" Di Kantor Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Data Olahan

Data Olahan Mandiri Profil Desa Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Senama Nenek Tahun 2018

Data Olahan Mandiri Profil Desa Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Senama Nenek Tahun 2018

Data Olahan Mandiri Profil Desa Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Senama Nenek Tahun 2018

Data Olahan Mandiri Profil Desa Jumlah Penduduk Berdasarkan Tenaga Kerja Desa Senama Nenek Tahun 2018

Data Olahan Mandiri Profil Desa Jumlah Penduduk Berdasarkan Kualitas Angkatan Kerja Desa Senama Nenek Tahun 2018

Data Olahan Mandiri Profil Desa Penduduk berdasarkan cacat mental dan fisik Desa Senama Nenek Tahun 2018

Data Olahan Mandiri Profil Desa Potensi Kelembagaan Pemerintahan Desa Senama Nenek Tahun 2018

Data Olahan Mandiri Analisis Aktor Desa Senama Nenek Tahun 2018

Data Olahan Mandiri Pemetaan jaringan sosial antar aktor Desa Senama Nenek Tahun 2018

Data Olahan Mandiri Matriks Analisis Aktor Desa Senama Nenek Tahun 2018

Data Olahan Mandiri Identifikasi forum masyarakat Desa Senama Nenek Tahun 2018

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa